

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

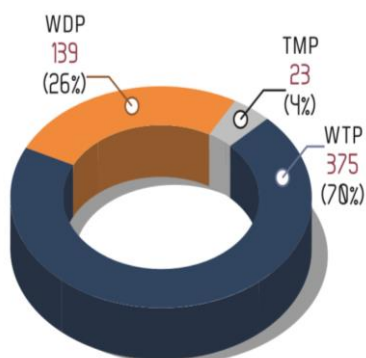
Disetiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang sering di sebut *Good Governace*. Pemerintah yang seperti ini merupakan suatu bentuk tugas untuk membangun negara yang sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan keberhasilan dalam menjalankan, setiap negara menetapkan rencana pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai dan mempertahankan kemakmuran bagi seluruh masyarakat, untuk mencapai tujuan tersebut setiap pemerintahan harus dapat mengelola sumber daya yang ada di negara yaitu mengenai sistem yang terintegritas salah satunya keuangan. Menyelenggarakan pemerintah daerah harus berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintah negara yang terdiri atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, profesional, akuntabel, efisien, efektif dan keadilan.

Laporan keuangan merupakan hal penting yang bisa memberikan informasi yang jelas tentang aktivitas suatu *entitas* ekonomi dalam suatu periode akuntansi. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan yang bertujuan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pembuatan laporan

keuangan di sektor pemerintah adalah suatu bentuk kebutuhan transparan, syarat pendukung adanya akuntabel yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.

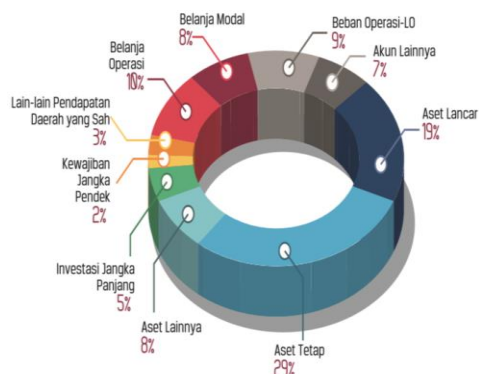
Berdasarkan hasil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap Pemerintah Daerah, sebagaimana yang tercantum dalam ikhtisar hasil pemeriksaan tahun 2016, BPK mengungkapkan bahwa dari tahun 2016 537 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terdapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan opini Tidak Memberi Pernyataan (TMP). (disajikan pada grafik 2.1) dan atas 162 LKPD yang belum memperoleh opini WTP umumnya disebabkan masih adanya kelemahan dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAP khususnya tiga akun besar, (disajikan pada grafik 2.4).

Grafik 2.1 Opini atas LKPD Tahun 2016



(sumber: [www.pbk.com.id\\_IHPS I tahun 2017](http://www.pbk.com.id_IHPS I tahun 2017))

Grafik 2.4 Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP pada LKPD Tahun 2016



(sumber: [www.pbk.com.id\\_IHPS I tahun 2017](http://www.pbk.com.id_IHPS I tahun 2017))

Berdasarkan fakta tersebut, masih diketahui masih terdapat kelemahan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) yang mengakibatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan masih rendah. Seharusnya pengelolaan keuangan pemerintah harus di terapkan dengan baik agar laporan

keuangan bisa relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami sehingga pemerintah daerah dapat menentukan dan merencanakan arah pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah, karena dengan menilai informasi tersebut pemerintah daerah dapat menentukan dan merencanakan arah pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah karena dengan informasi tersebut pemerintah dapat memonitor akuntabilitas manajemen, politik dan kebijakan.

Permasalahan yang terdapat pada laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kota sukabumi bahwa pengelolaan aset masih bermasalah meskipun LKPD kota sukabumi telah meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dua tahun berturut-turut. Menurut Kasubbid Inventarisasi Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah mengungkapkan bahwa dari hasil sidak ternyata masih ada beberapa organisasi perangkat daerah yang minta inventarisasi aset diselesaikan dengan cepat, tapi tidak dibarengi dengan data yang belum valid. Tentunya ini jadi permasalahan karena masih banyak aset daerah yang belum terinventarisasi menurut hasil audit BPK nilai aset bergerak dan tidak bergerak milik pemerintahan kota sukabumi mencapai Rp. 1,8 triliun sedangkan kalau dengan penyusutan nilai aset pemkot Rp. 1,1 triliun.

Setiap permasalahan yang terjadi dalam instansi pemerintahan dalam laporan keuangan itu bisa terjadi akibat pengawasan yang lemah dari setiap sistem pengendalian internnya, Meski suatu pemerintah daerah telah memiliki sistem pengelolaan keuangan yang *komprehensif*, berbasis teknologi yang canggih, dan diopersasikan oleh orang yang ahli dibidangnya tapi jika manajemen telah melakukan penipuan, manipulasi atau rekayasa terhadap data-data keuangan, tanpa

adanya pengendalian sistem maka validitas output akan dipertanyakan keabsahannya. Melalui penerapan prinsip pengendalian intern yang efektif menjadi salah satu kriteria penilaian dalam memberikan opini wajar pada laporan keuangan.

Memberikan kepastian yang layak bagi manajemen bahwa pemerintahan telah mencapai tujuan dan sasarannya, pengendalian *intern* meliputi rencana organisasi, metode dan ukuran serta kebijakan yang terkoordinasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain diawasi dengan sistem pengendalian, Kualitas laporan keuangan juga harus menerapkan standar yang didalamnya terdapat kebijakan dan prinsip akuntansi agar tidak terjadi kesalahan dalam memasukan elemen-elemen akuntansi seperti dalam pencatatan laporan keuangan hal ini, agar tidak terjadi ketidak samaan dalam pelaporan keuangan misalnya keluar dari kaidah-kaidah akuntansi yang sudah diterapkan oleh peraturan pemerintah. SAP merupakan standar yang digunakan oleh pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang disusun oleh komite standar akuntansi pemerintah (KSAP). Standar yang di terapkan di pemerintahan Indonesia adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 SAP tentang prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan

menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), hal ini bertujuan untuk transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintah, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD.

SAP merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintah Indonesia dengan standar ini, laporan keuangan pemerintah dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan *stakeholders* sehingga pengelolaan keuangan negara transparan dan akuntabel. Hal tersebut diperlukan guna menjamin konsisten dalam pelaporan keuangan dan untuk menghindari timbulnya implikasi negatif, tentang rendahnya objek informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akibat kelemahan struktur pengendalian *intern*, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengauditan. Dalam rangka mewujudkan transparan dan akuntabel pengelola keuangan Negara/Daerah, pemerintah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berupa laporan keuangan yang sesuai dengan SAP.

Berikut ini beberapa penelitian sebelumnya yang menyangkut tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan, antara lain:

1. Berdasarkan hasil penelitian M. Ali Fikri dan RR. Sri Pancawati (2016) tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur dan peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan tahun 2016 di NTB, adapun hasil temuan dalam penelitiannya

menunjukkan bahwa penerapan SAP, kompetensi aparatur, peran audit internal dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan karena sampel yang digunakan hanya pada SKPD NTB.

2. Penelitian yang dilakukan terdahulu Mia Oktarina dkk (2014) meneliti tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah dan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan di kota semarang. Hasil pengujian statistik menunjukkan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,05 terhadap kualitas laporan keuangan SKPD pemerintahan kota semarang
3. T. Astri Yunita (2015) menunjukkan hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Interen dan Kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan Daerah di SKPD kota Dumai, itu dilihat dari setiap pengujian hipotesis dari setiap variabel berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hubungan penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian *intern* dimana standar akuntansi pemerintahan yang di terapkan sesuai PP NO 71 Tahun 2010 dan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal tersebut sangat dibutuhkan oleh setiap instansi pemerintahan agar berjalan dengan baik.

Berdasarkan pernyataan dan fenomena-fenomena yang terjadi tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SISTEM**

## **PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN”.**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Pengendalian *Intern* (SPI) memiliki permasalahan tentang kinerja pemerintah khususnya pada kualitas laporan keuangan. Setelah diidentifikasi lebih lanjut, maka adapun permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Laporan keuangan yang belum memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan disebabkan masih banyak akun-akun yang tidak sesuai dengan SAP
2. Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi sepenuhnya belum diatur dalam standar akuntansi pemerintahan
3. Kurang berkualitasnya laporan keuangan pemerintah karena belum relevan, andal, dapat dipahami dan dibandingkan
4. Masih lemahnya Pengendalian Intern disebabkan kurang efektif dan efisien suatu sistem di Pemerintahan
5. Masih terdapat permasalahan dalam pelaporan pertanggungjawaban atas laporan keuangan di pemerintah

### **1.3 Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas permasalahan yang diteliti berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan kota Sukabumi?

2. Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Bagaimana pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian *Intern* terhadap Kualitas Laporan Keuangan?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan sebagai konsep penerapan ilmu akuntansi pada sektor pemerintahan. Dengan maksud tersebut, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas Laporan Keuangan pemerintahan.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian terdiri atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam memperluas wawasan bagi kajian ilmu akuntansi dalam mengelola laporan keuangan, khususnya laporan keuangan di sektor pemerintah/daerah karena laporan keuangan tersebut dapat memperlihatkan kualitas dan kondisi



pemerintahan yang sebenarnya, sehingga dapat dijadikan rujukan untuk mengembangkan penelitian akuntansi yang akan datang.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan memperluas ilmu yang berharga bagi penulis sehingga penulis dapat memperoleh gambaran dari pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian inter terhadap kualitas laporan keuangan

### b. Pihak Pemerintah

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan dapat memberi sumbangan saran serta bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

### c. Pihak Lain

Pihak ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk melengkapi sarana yang dibutuhkan dalam penyediaan bahan studi bagi pihak yang membutuhkan terutama yang berkaitan dengan penerapan akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan.